

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN KREDIT BPR (BANK
PERKREDITAN RAKYAT) DANA AMANAH KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2012**

Harry Anugrah
e-mail : anugraharry@yahoo.co.id
Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293.

Abstract:

People assume that if the government really wants to help the middle and lower economic communities, the government should not have to pay interest loans to lower middle economic people and this will cause problems in achieving the goals of the program pemberan rural banks in one trust fund the customer is in arrears. The purpose of this study was to determine the factors causing non optimal implementation of economic empowerment programs through program lending trust fund BPR (Rural Bank) Pelalawan. In this study, the concept is derived from the theoretical evaluation of the implementation of Edward III declared that there are 4 (four) variables are crucial in the implementation of communication, resources, character or attitude and bureaucratic structures. The location of this study are in BPR (Rural Bank) Trust Fund Pelalawan. This study used qualitative research methods to the study of descriptive data. In collecting data the researcher used interview techniques and documentation. The results of this study it can be concluded that the implementation of the loan program BPR (Rural Bank) Pelalawan Trust Fund in 2012, can not be said to be effective, it can be proved from the 5 indicator variables are used as benchmarks in this study, almost all of the indicators are in the category less effective. For that expected in implementing these programs should be the implementing agency should consider that the effective lending strategies and efficient, BPR should conduct in-depth analysis of the internal condition of the RB.

Keywords: Implementation, Program Lending, Trust Fund

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. BPR sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Oleh karena itu sudah saatnya untuk menempatkan sektor informal (seperti petani kecil di pedesaan, pedagang di pasar tradisional, penjual rokok dan

pedagang warung kelontong) di barisan terdepan dalam penetapan kebijakan Bank Indonesia (*Putting the Last First*). Terkait dengan hal tersebut, serta dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan sektor informal, peran dan kontribusi BPR sebagai ujung tombak lembaga keuangan daerah dalam pembiayaan sektor informal tentunya menjadi sangat penting. BPR dianggap yang paling dekat dan paling mengetahui nasabahnya dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (Bramantyo dan Ronny, 2007:58).

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Dana Amanah Kabupaten Pelalawan sejak berdiri dan beroperasi Januari 2009 sampai tahun 2011 telah mengalami perkembangan cukup signifikan. Pasalnya, dari modal awal yang dikucurkan Pemda Pelalawan sebesar Rp 12, 850 Miliar kini assetnya telah menjadi Rp 21 Miliar.

Laba berjalan yang telah diraih PD BPR Dana Amanah mencapai Rp1 Miliar. Kredit yang disalurkan mencapai Rp 19, 549 Miliar. Sedangkan mengenai tabungan masyarakat, tabungan talangan haji, Simpanan Anak Negeri (SAN) mencapai Rp 4,778 Miliar. Sedangkan deposito yang masuk dengan suku bunga bersaing mencapai Rp. 1,9 Miliar. Suksesnya PD BPR Dana Amanah milik Pemda Pelalawan ini 100 persen bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan PD BPR Dana Amanah yakni sebagai sebuah lembaga keuangan milik pemda Pelalawan yang menjadi penyalur kredit usaha mikro kecil dan menengah,

demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Pelalawan.

Bank Perkreditan Rakyat sebagai pemberi kredit Dana Amanah dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli). Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dana amanah menjalankan kegiatan dengan sistem konvensional. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah pedesaan dengan membantu membiayai pembangunan dan modernisasi ekonomi pedesaan di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam arti luas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Perkreditan Rakyat di samping berfungsi sebagai lembaga keuangan milik Pemerintah Kabupaten Pelalawan sekaligus akan berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008). Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 pada pasal 1 disebutkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah yang selanjutnya disingkat PD. BPR Dana Amanah, adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Pelalawan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan.

Pada pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, menyebutkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, dan menggerakkan pembangunan Daerah Pedesaan dengan membantu membiayai pembangunan dan modernisasi ekonomi pedesaan di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam arti luas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Dana Amanah menyelenggarakan usaha antara lain: a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan, 2) memberikan kredit dan sekaligus melaksanakannya. Berdasarkan rencanan anggaran dan realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana penghimpunan Dana dianggarkan sebesar Rp.25.929.141,- ribu pada semester I dan sebesar Rp. 30.038.412,- ribu pada semester II tahun 2012, atau 136.08% dari realisasi tahun 2011.
2. Rencana penyaluran dana dianggarkan sebesar Rp. 25.347.792,- ribu pada semester I dan sebesar Rp. 29.291.042,- ribu pada semester II tahun 2012, atau 134.61% dari realisasi tahun 2011.
3. Rencana Pendapatan dianggarkan sebesar Rp.2.301.130,- ribu pada

semester I dan sebesar Rp.6.217.873,- ribu pada semester II tahun 2012, atau 137.22% dari realisasi tahun 2011.

4. Rencana biaya dianggarkan sebesar Rp.1.766.197 ribu pada semester I dan sebesar Rp. 4.640.192,- ribu pada semester II tahun 2012, atau 139.79% dari realisasi tahun 2011.
5. Rencana Laba/rugi Tahun Berjalan dianggarkan sebesar Rp. 534.932,- ribu pada semester I dan sebesar Rp. 1.577.681,- ribu pada semester II tahun 2012, atau 130.17% dari realisasi tahun 2011.

Masyarakat beranggapan bahwa kalau pemerintah memang benar-benar ingin membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan bunga pinjaman kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan ini akan menimbulkan permasalahan pada pencapaian tujuan dari program pemberian kredit BPR pada dana amanah salah satunya adalah terjadinya tunggakan pada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan permasalahan yang terjadi pada nasabah adalah tingkat suku bunga yang tinggi dari 18% untuk kredit produk wirausaha, produk kebun tani, produk anggota koperasi, dan waktu pengembalian angsuran pinjaman selama 36 bulan, mengakibatkan peserta mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman, sehingga keadaan ini berpeluang menciptakan kredit macet.

Besarnya jumlah pinjaman dari nasabah yang menunggak telah membuat kredit macet pada Usaha Bank Perkreditan Rakyat dan ini bisa mengakibatkan pengaruh terhadap

pencapaian tujuan program kredit BPR Dana Amanah.

Kredit macet yang tidak tertagih akan mengakibatkan disita agunan kreditur yang konsekuensi akan dilelang. Dampak dari keadaan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh fenomena berikut:

1. Pada nasabah produk wirausaha terjadinya tunggakan pembayaran kredit dikarenakan jumlah keuntungan penjualan yang diperoleh menurun, sehingga dana yang dibutuhkan untuk membayar angsuran kredit tidak tersedia.
2. Pada nasabah wirausaha ada yang mengalami bencana alam (kebanjiran) mengakibatkan kerugian pada barang dagangannya, sehingga nasabah tidak memiliki dana untuk membayar angsuran.
3. Pada nasabah produk kebun tani terjadinya penurunan harga jual hasil kebun tani, sehingga dana yang dibutuhkan untuk membayar angsuran kredit tidak tersedia.
4. Pada nasabah wirausaha dan kebun tani melakukan pinjaman kredit pada 2 bank dalam waktu yang hampir bersamaan, akibatnya nasabah kesulitan dalam membayar angsuran kredit.
5. Adanya sebagian nasabah yang tidak dapat ditagih sama sekali pembayaran kredit

karena sudah pindah alamat ke daerah lain, sehingga pihak Bank harus bekerja ekstra untuk menemukan alamat nasabah tersebut.

Statistik Perbankan Indonesia (SPI) edisi terakhir yang terbit pada 11 Januari 2013 mencatat kredit tahunan tumbuh subur 21,51 persen dari Rp40,68 triliun per November 2011 menjadi Rp49,43 triliun per November 2012. Dana pihak ketiga (DPK) yang hanya meliputi deposito dan tabungan tumbuh kalah subur yakni 17,57 persen dari Rp37,28 triliun menjadi Rp43,83 triliun. Dengan aneka keterbatasan, BPR masih kalah dibandingkan bank umum dalam pertumbuhan kredit 21,94 persen dan DPK 18,14 persen.

Pertumbuhan itu mengangkat loan to deposit ratio (LDR) dari 80,67 persen menjadi 81,11 persen sedikit lebih rendah daripada LDR bank umum 83,61 persen tetapi keduanya masuk rasio ideal 78-100 persen. LDR BPR yang makin tebal itu menyiratkan fungsi intermediasi keuangan BPR makin cantik. Ini sejalan dengan upaya Bank Indonesia (BI) dalam mendorong bank umum dan BPR untuk mengerek pengucuran kredit dengan menurunkan BI Rate yang kini mencapai 5,75 persen sejak Februari 2012.

Suku bunga rata-rata deposito terus merosot dari 9,99 persen per November 2011 menjadi 8,44 persen per November 2012 sedangkan tabungan menurun sedikit dari 5,30 persen menjadi 4,71 persen. Penurunan suku bunga rata-rata itu telah menekan suku bunga rata-rata kredit. Maka, suku bunga kredit modal kerja menipis dari 32,22 persen menjadi 31,19 persen, kredit investasi dari 28,19 persen

menjadi 27,05 persen dan kredit konsumsi dari 27,09 persen menjadi 26,10 persen pada periode yang sama.

Ada gejala menarik bila dibandingkan dengan bank umum. BPR justru menawarkan suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi lebih tinggi daripada kredit konsumsi. Sebaliknya, bank umum memasang suku bunga kredit konsumsi lebih tinggi daripada kredit produktif. BPR juga mampu mencetak laba tahun berjalan yang melesat 26,14 persen dari Rp1,76 triliun menjadi Rp2,22 triliun. Hal ini membuat imbal hasil aset (*return on assets/ROA*) naik dari 3,53 persen menjadi 3,68 persen atau lebih dua kali ambang batas 1,5 persen. ROA BPR itu berhasil melampaui ROA bank umum 3,12 persen.

Di tengah anjuran BI untuk menipiskan margin bunga bersih (*net interest margin/-NIM*), BPR masih menikmati NIM tinggi sekira 18 persen dengan mencermati selisih suku bunga rata-rata kredit dengan deposito. NIM BPR itu jelas jauh lebih tinggi daripada NIM rata-rata industri bank umum 5,48 persen. BI telah menerbitkan suku bunga dasar kredit (SBDK) mikro efektif 15 Januari 2013 yang bertujuan final untuk menurunkan suku bunga kredit mikro. Untuk itu, BPR wajib menipiskan suku bunga kredit antara lain dengan menaikkan tingkat efisiensi dan transparansi. Tanpa itu, BPR bakal terjepit di antara bank umum yang makin rajin bermain di kredit mikro. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) hendaknya menggandeng mesra Perbanas untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan perbankan yang terus berkembang,

katakanlah, kredit, audit, manajemen risiko dan kepatuhan (*compliance*).

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini. “Mengapa pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pemberian kredit dana amanah BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Kabupaten Pelalawan belum optimal dilaksanakan?”

METODE

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan secara deskriptif pula. Dalam memperoleh data penelitian ini yang menjadi *key informan* penelitian antara lain sebanyak 6 nasabah yang dipilih sebagai *informan* penelitian. Nasabah dalam hal ini adalah 2 orang kreditor yang teratas bermasalah dalam pengembalian kredit, 2 orang kreditor yang teratas lancar dalam pengembalian kredit. *Informan kontrol* pada penelitian ini 2 orang pegawai bagian kredit.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data skunder sesuai dengan klasifikasi atau pengelompokan informasi atau data yang telah

diperoleh. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara langsung mengenai data tentang tanggapan pelaksanaan program pemberian kredit dana amanah, dan data tentang kendala pelaksanaan program pemberian kredit dana amanah. Data Sekunder yaitu data informasi pendukung yang sudah tersedia dan terdaftar pada BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Dana Amanah Kabupaten Pelalawan seperti data nasabah kredit, data tunggakan, data kolektibiliti, sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan hasil penelitian yang turut mendukung dalam penelitian ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Program Pemberian Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Dana Amanah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012.

Dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap pencapaian tujuan program Dana Amanah BPR di Kabupaten Pelalawan . Untuk itu, ditelaah satu persatu pertimbangan pencapaian tujuan pemberian kredit BPR Dana Amanah di Kabupaten Pelalawan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah

ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.

Program komunikasi ini menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat Tanggapan responden masyarakat (nasabah) dan aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan penghasilan, pendapatan dan mengurangi pengangguran ada sebanyak 18 orang yang mengatakan efektif dengan persentase (56,3%). Ini menunjukkan bahwa responden yang menilai dalam Komunikasi Ini yang dilakukan oleh aparat memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat (nasabah) dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh aparat dan masyarakat (nasabah). Kemudian ada 14 orang yang mengatakan kurang efektif dengan persentase (43,7%). Ini menunjukan bahwa aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan penghasilan, pendapatan dan mengurangi pengangguran tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dikatakan kurang efektif.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilaksanakan dalam menilai capaian tujuan program Program Pemberian Kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Dana Amanah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting,

karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah : a) Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, b) Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, c) Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, d) Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Tanggapan responden masyarakat (nasabah) dan aparat pelaksana Mengenai Sumber daya ada sebanyak 6 orang yang mengatakan efektif dengan persentase (18,8%). Ini menunjukkan bahwa responden yang menilai mengenai sumber daya dalam penetapan suku bunga sudah standar , kemudian ada sebanyak 26 orang dengan persentase (81,2%) mengatakan kurang efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya dalam menetapkan suku bunga tidak melihat kondisi dari perekonomian masyarakat (nasabah).

3. Sikap

Sikap adalah berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

Tanggapan responden tentang sikap yang mencakup kriteria peminjam, kriteria besar pinjaman dan kriteria jangka waktu. Pada aspek kriteria peminjam mayoritas responden menyatakan kategori ada, yaitu sebesar

100%, demikian pula pada aspek kriteria besar pinjaman secara umum menyatakan ada dengan persentase sebesar 100%. Keadaan ini disebabkan oleh adanya standarisasi yang telah ditetapkan oleh peraturan dari program Pemerintah.

Sedangkan, pada aspek kriteria jangka waktu paling banyak responden menyatakan kategori ada, yaitu sebanyak 29 orang (100%). Keadaan ini berguna agar peminjam tidak kesulitan dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam jangka waktu pengembalian pinjaman.

Melihat tanggapan responden masyarakat (nasabah) dan aparat pelaksana mengenai Sikap, ada sebanyak 28 orang dengan persentase (87,5%) yang mengatakan Efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana telah mampu melaksanakan tugasnya mengenai Sikap, dengan kriteria yang ada. Sementara itu, ada sebanyak 4 orang dengan persentase (12,5%) yang mengatakan Kurang Efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana kurang mampu dalam melaksanakan tugas nya mengenai Sikap, serta kriteria yang telah di gunakan belum tepat dan adanya masyarakat (nasabah) yang kurang menyetujui dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Tanggapan responden masyarakat (nasabah) mengenai struktur birokrasi, ada sebanyak 8 orang dengan

persentase (27,5%) yang mengatakan efektif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat (nasabah) menilai aparat pelaksana telah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di lihat dari segi penghasilan, kesejahteraan, lapangan kerja dan kepemimpinan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (nasabah) yang tingkat penghasilan dan kesejahteraan yang rendah dan sulitnya mencari lapangan kerja yang mengakibatkan terjadinya pengangguran. Sebanyak 21 orang dengan persentase (71,5%) yang mengatakan Kurang Efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga tidak adanya perubahan pada penghasilan, kesejahteraan, lapangan kerja dan kepemimpinan.

Sedangkan untuk responden aparat mengenai Struktur birokrasi, ada sebanyak 2 orang dengan persentase (66,7%) yang mengatakan Efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana telah menjalankan tugasnya dengan baik dilihat dari segi penghasilan, kesejahteraan, lapangan kerja dan kepemimpinan, sementara itu ada sebanyak 1 orang dengan persentase (33,4%) yang mengatakan Kurang Efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat pelaksana belum mampu melaksanakan tugas nya dengan baik sehingga tidak adanya perubahan pada penghasilan, kesejahteraan, lapangan kerja dan kepemimpinan.

Melihat tanggapan responden masyarakat (nasabah) dan aparat pelaksana mengenai Struktur birokrasi, ada sebanyak 10 orang dengan persentase (31,3%) yang mengatakan Efektif. Ini menunjukkan bahwa aparat

pelaksana telah mampu meningkatkan penghasilan, kesejahteraan, lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan manfaat yang diperoleh langsung dirasakan oleh masyarakat (nasabah). Selanjutnya ada sebanyak 22 orang dengan persentase (68,7%) yang mengatakan Kurang Efektif, ini menunjukkan bahwa, kurangnya perubahan yang terjadi di lapangan dalam meningkatkan penghasilan, kesejahteraan, lapangan kerja dan kepemimpinan sehingga kurangnya manfaat yang diperoleh masyarakat (nasabah).

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan program BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan adalah **Kurang Efektif**, kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat (nasabah) merasa kurang mampu dalam mengelola dana pinjaman dari Program BPR Dana Amanah yang ada di Kabupaten Pelalawan secara maksimal, sehingga kondisi kemampuan masyarakat (nasabah) dalam pengembalian kredit masih rendah.

Berdasarkan keterangan informan di atas dapat dikatakan bahwa hambatan pelaksanaan program pemberian kredit BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Dana Amanah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 adalah:

1. Kecenderungan masyarakat umumnya untuk membuka pinjaman kredit untuk berinvestasi serta menambah modal kerja dari pada menempatkan dana mereka di bank.

2. Kurangnya fasilitas yang dimiliki bank dalam melakukan transaksi misalnya ATM.
3. Kurangnya tenaga marketing khusus penghimpunan dana.
4. Tingginya tingkat persaingan antar bank yang ada di Pelalawan dengan memberikan fasilitas yang lebih lengkap.
5. Pendapatan masyarakat yang cenderung tidak stabil sehingga terjadi penarikan dana dalam waktu yang relatif singkat, serta mengurangi kemampuan untuk melakukan saving.
6. Fasilitas pelayanan yang kalah bersaing dengan Bank lain seperti ATM.
7. Belum optimalnya perhatian Pemilik untuk menggunakan jasa dan produk bank yang ditawarkan.

Dari hasil temuan penelitian maka dari asumsi penulis terhadap pelaksanaan program BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh program ini adalah untuk meningkatkan penghasilan, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Sebelum nasabah melakukan pinjaman nasabah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari yang serba pas-pasan, di mana selama ini sebagian dari masyarakat (nasabah) mengeluh akan perekonomian keluarganya kepada aparat pelaksana.

Oleh karena itu, dengan adanya program ini dan nasabah melakukan pinjaman nasabah dapat tambahan dalam memenuhi kebutuhan nasabah sehari-hari yaitu penambahan dalam

penghasilan nasabah saja, untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran program ini belumlah mampu dikarnakan umumnya pinjaman nasabah kecil dan nasabah mengelola sendiri dari usaha yang nasabah kelola.

2. Sumber daya

Adapun permasalahan yang terjadi dilapangan adalah tingkat suku bunga yang tinggi yang mengakibatkan masyarakat (nasabah) tidak sanggup untuk melakukan pinjaman yang lebih besar dengan harapan agar capaian tujuan ini terlaksana secara efektif. Jadi, masyarakat (nasabah) berasumsi bahwa biarlah nasabah melakukan pinjaman dengan modal yang kecil semata-mata untuk menambah penghasilan nasabah sehari-hari. Karena dengan penghasilan yang nasabah dapatkan masih dirasakan kurang.

3. Sikap

Pada umumnya kriteria yang di tetapkan oleh pelaksanaan program BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan bagi nasabah yang telah mempunyai usaha, agunan, KTP, KK, dan warga tempatan. Rata-rata agunan yang diberikan nasabah kepada pelaksanaan program BPR Dana Amanah Kabupaten Pelalawan Surat Tanah dan BPKB mobil agunan nasabah haruslah sesuai dengan pinjaman yang nasabah ajukan. Untuk kriteria jangka waktu berdasarkan kesepakatan dan kemampuan dari peminjam.

Semua kriteria yang nasabah penuhi belumlah tentu nasabah langsung mendapatkan pinjaman karena sebelum dana di keluarkan aparat palaksana melakukan survey setelah itu barulah dilakukan analisa kelayakan

calon kredit nasabah yang melakukan pinjaman.

4. Struktur birokrasi

Kenyataan yang ditemui dilapangan oleh penulis, perubahan yang terjadi hanyalah untuk nasabah sendiri artinya belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain perubahan yang terjadi hanya pada tingkat penghasilan nasabah saja. Dapat dilihat bahwa tujuan program ini sangat baik sekali dengan cara meningkatkan penghasilan, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran namun yang terjadi di lapangan hanyalah satu dari ketiga tujuan program ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anoraga, Pandji. dan Suyaiti. Sri. 2001. *Perilaku Keorganisasian*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Edward III, George C. *Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan* dalam A.G Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Islamy Irfan. 1998. *Materi Pokok Kebijakan*. Jakarta: Publik Karunika.
- Moleong. Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, S. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha. Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi. Pelaksanaan. dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong. Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pedoman Penulisan dan prosedur Ujian Skripsi Fisip Universitas Riau. 2008. Pekanbaru: UR Press.
- Safiie, Jim Kencana. 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- S. Mulyadi. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian. P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salam Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Winarno. Budi 2007. *Kebijakan Public*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainun Buchari. 2004. *Sumber Daya Pemerintahan Negara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.